



KAJIAN KEBUTUHAN DAERAH UNTUK PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KEBUMEN

Ari Waluyo^{1*}, Sotya Partiwidiwijoyo²,

¹Teknik Elektronika, Politeknik Dharma Patria

²Akuntansi, Politeknik Dharma Patria

*Email : ari.hardware@yahoo.com

Doi : <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.873>

Diterbitkan oleh Politeknik Dharma Patria Kebumen

Info Artikel

Diterima :

Diperbaiki :

Disetujui :

ABSTRAK

Kajian kebutuhan daerah disusun sebagai landasan dalam perencanaan pendirian BUMD Aneka Usaha di Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen menilai perlu diupayakan usaha lain untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, karena hasil persentase pendapatan asli daerah Kab. Kebumen tahun 2016 hingga 2020 masih di kisaran 12,36%, sehingga untuk mendanai pembangunan daerah otonom dapat dikatakan belum cukup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif explanatory. Data primer diperoleh dari hasil survei kebutuhan daerah yang diisi oleh responden dalam hal ini adalah masyarakat kabupaten Kebumen yang juga merupakan user sekaligus stake holder. Hasil survey yang menjadi kebutuhan daerah Kab. Kebumen sehingga Pemerintah Kab. Kebumen dipandang perlu mendirikan perusahaan/BUMD baru adalah karena perlunya optimalisasi sektor-sektor unggulan atau potensial di daerah selain itu perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pendirian BUMD baru ini diharapkan dapat meningkatkan akselerasi di sektor perindustrian, perdagangan serta jasa.

Kata Kunci: kebutuhan daerah, BUMD, pendirian badan usaha, keuangan daerah

ABSTRACT

The study of regional needs was prepared as a basis for planning the establishment of BUMD Aneka Usaha in Kebumen Regency. The Kebumen Regency Government considers that other efforts need to be made to increase the source of regional original income, because of the percentage of the district's original revenue. Kebumen in 2016 to 2020 is still in the range of 12.36%, so it is not enough to fund the development of autonomous regions. The method used in this study is a descriptive explanatory method. Primary data is obtained from the results of a survey of regional needs filled in by respondents, in this case, the people of Kebumen district who are also users and stakeholders. The results of the survey became the needs of the district. Kebumen so that the District Government. Kebumen is deemed necessary to establish a new company/BUMD due to the need to optimize leading or potential sectors in the region in addition to the need to increase Regional Original Income (PAD), so that the establishment of this new BUMD is expected to increase acceleration in the industrial, trade and service sectors.

Keywords: regional needs, BUMD, business establishment, regional finance

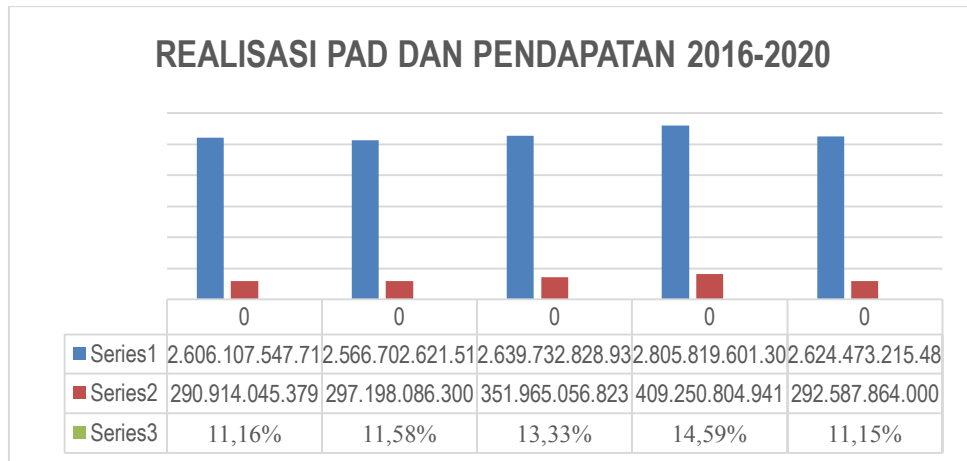
Alamat Korespondensi : Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 55431

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah tidak hanya memperoleh keleluasaan, tetapi juga memperoleh kemampuan untuk mengelola dan menggali potensi bisnis yang mampu menjadi sumber penerimaan daerah. Terkait dengan usaha peningkatan penerimaan daerah, bila sekarang ini menggunakan konsep prinsip ekonomi dalam pengelolaan perusahaan (tata kelola pemerintahan daerah) adalah dengan mendirikan unit usaha baru yang layak dan dapat diandalkan. Bentuk unit usaha tersebut adalah dengan mendirikan BUMD baru. Keberadaan BUMD diharapkan dapat berperan dalam produksi barang dan jasa yang diperlukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat setempat. Pembangunan perekonomian kabupaten/kota merupakan awal dari pelaksanaan pembangunan, diharapkan kabupaten/kota dapat lebih memahami potensi dan kebutuhan daerah.

Menurut Walewangko's Blakely (2017), pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana semua bagian pemerintah dan masyarakat mengelola dan berkolaborasi pada berbagai sumber daya agar terciptanya lapangan kerja baru juga dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah. Teori Gunal Maddal oleh Therisia dkk (2014) Pembangunan ekonomi disebabkan oleh berbagai kondisi ekonomi, antara lain: (1) Pendapatan dan pendapatan. (2) Tingkat produktivitas. (3) Standar hidup (4) Sikap dan sistem (5) Rasionalitas. Diketahui bahwa tingkat awal pendapatan daerah merupakan suatu indikator pada penilaian kapasitas daerah dan peran pemerintahan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga dapat dikatakan, kedudukan PAD cukup strategis dalam tahapan pelaksanaan dan proses pembangunan di daerah, PAD digunakan untuk membiayai sebagian belanja pembangunan setiap tahunnya.

Mengingat peran PAD yang sangat strategis di setiap daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self-supporting). Rendahnya tingkat PAD pada suatu daerah menjadikan pemerintahan daerah harus mampu membuat terobosan baru dalam meningkatkan penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyadari bahwa pendapatan asli daerah belum memadai untuk membiayai besarnya kebutuhan pembangunan daerah, seperti yang tergambar dalam grafik Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 berikut ini:



Gambar 1. PAD atas Pendapatan Kab Kebumen 2016-2020

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan data di atas, persentase pendapatan asli daerah masih rata-rata hanya 12,36% antara tahun 2016 hingga 2020, sehingga persentase pendapatan asli daerah masih mendanai pembangunan daerah otonom tersebut, dapat dikatakan belum cukup. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen menilai perlu diupayakan usaha lain untuk meningkatkan sumber penerimaan PAD. Dalam semangat desentralisasi, investasi daerah seperti pembelian surat berharga dan penanaman modal adalah untuk menambah kas dengan mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan sendiri, yang merupakan alternatif (Halim, 2012).

Menurut status quo, bisnis yang cerdas, lebih mungkin dan lebih handal dalam upaya menambah sumber-sumber penerimaan (pendapatan) lokal adalah beroperasi sesuai dengan kaidah ekonomi manajemen usaha yaitu dengan mendirikan unit usaha lain dalam bentuk perusahaan daerah. Hal ini sejalan dengan capaian target dan tujuan pembentukan BUMD yaitu sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah (P2 LIPI, 2010, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - Revitalisasi BUMD dalam Perekonomian Daerah). Kegiatan ekonomi adalah usaha dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan. Salah satu cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik individu, kelompok, atau negara, yaitu dengan terlibat dalam kegiatan ekonomi ini adalah melalui unit bisnis mereka.

Pelaku ekonomi adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Otonomi daerah untuk meningkatkan perekonomian memungkinkan Anda untuk mendirikan bisnis lokal untuk tujuan pelayanan publik, tujuan keuntungan, atau kombinasi keduanya. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah pelaku ekonomi yang seluruh atau sebagian besar modalnya (modal) berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. BUMD merupakan salah satu wujud nyata pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat efektivitas dan efisiensi BUMD dalam mengelola sumber daya berpengaruh pada kontribusinya di perekonomian daerah, hal ini perlu untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen mengacu pada peraturan yang ada melakukan kajian kebutuhan daerah dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen.

Penyusunan kajian kebutuhan daerah untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka

Usaha Kabupaten Kebumen ini merupakan landasan dalam perencanaan pendirian BUMD Aneka Usaha di Kabupaten Kebumen. Dalam kajian ini terangkum hal-hal apa yang akan dan harus diatur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kajian kebutuhan daerah ini merupakan kajian yang menggunakan data primer dan dan sekunder. Untuk data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden dalam hal ini adalah masyarakat kabupaten Kebumen yang juga merupakan user sekaligus stake holder. Diharapkan hasil dari survei kebutuhan daerah ini dapat mewakili persepsi dan kebutuhan masyarakat terhadap pendirian BUMD baru ini. Data sekunder yaitu survei literatur akademik melalui daring, metode ini tepat digunakan untuk sebagai alternatif untuk mensiasati keterbatasan penulis untuk terjun langsung ke lapangan.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 23, Pasal 331 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Tahun 2014, ditetapkan bahwa pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. UU No. 23/2014 juga menjelaskan bahwa pendirian BUMD haruslah dikaji melalui survey akan kebutuhan daerah. Pendirian usaha identik dengan penanaman modal, sehingga langkah selanjutnya adalah dengan menghitung kelayakan usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan lokal dinilai melalui penelitian yang mencakup aspek pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan didirikannya BUMD adalah untuk memberi manfaat bagi perkembangan ekonomi wilayah secara keseluruhan. BUMD dalam usahanya mendahulukan kepentingan umum dalam bentuk penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berdasarkan tata kelola (corporate governance) yang baik, dan bergantung pada kondisi alam dan budaya serta karakteristik daerah yang bersangkutan. Setiap jenis usaha haruslah dapat menimbulkan keuntungan dan/atau menghasilkan keuntungan. Menyadari hal tersebut, ruang lingkup BUMD tidak fokus hanya pada satu bidang saja, tetapi dalam agribisnis, pembangunan konstruksi, real estate, industri strategis, konsultasi, jasa/perdagangan, perbankan, asuransi, telekomunikasi, transportasi (darat, laut, udara). Energi (listrik) dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, pariwisata, penerbangan, infrastruktur, dan jenis bidang usaha lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut korporasi yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara dan/atau pemerintah daerah untuk berusaha di berbagai bidang di Indonesia. Mengadopsi konsep Marwah M. Diah dalam restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD, secara umum tujuan dan tugas utama BUMD ditetapkan oleh pemerintah (pusat/daerah). UUD 1945 merupakan dasar hukum pembentukannya. Diktum Pembukaan UUD '45 tersebut menyatakan bahwa berdirinya negara dan pemerintahan Indonesia harus memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk melaksanakan misi UUD 1945, pemerintah daerah di bidang ekonomi mendirikan BUMD, sarana pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia. Misi dan tujuan BUMD adalah memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan pendapatan asli daerah, dan untuk menumbuhkan minat/pendapatan daerah, terutama mengingat berbeda dengan perusahaan swasta. Misi BUMD adalah memberikan keuntungan berupa produk dan jasa yang berkualitas dan rasional untuk memenuhi kebutuhan banyak orang, mengembangkan kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh swasta atau koperasi. BUMD berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan maupun program pemerintah melalui bidang-bidang usaha pada umumnya.

BUMD menjadi salah satu penggiat ekonomi dengan tujuan memperoleh laba yang diperuntukkan sebagai modal pendapatan keuangan daerah. Operasional BUMD kerap dihadapkan dalam suatu masalah khususnya dalam tata kelola perusahaan yang pelaksanaannya berdasarkan good corporate governance sehingga mampu mencerminkan budaya perusahaan yang baik. Tidak terlaksananya Good corporate governance dalam suatu perusahaan secara tidak langsung dapat berdampak dengan timbulnya kerugian yang dikarenakan produktivitas yang rendah dan sebagai akibatnya perusahaan kurang bisa bersaing pada pasar lokal (domestik) juga global. Selain itu, penyebab inefisiensi BUMD adanya dikotomi, apakah BUMD menjadi pelaku ekonomi yang berotonomi penuh ataukah hanya menjadi pelaksana atau bagian berdasarkan struktur organisasi pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 40 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah, merupakan badan bisnis yang semua atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah. Mendasari pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang BUMD, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Badan usaha dimiliki oleh:
 - a. 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - b. Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - c. 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - d. Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
3. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
5. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Berdasarkan Keputusan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD bertujuan untuk: (2) Dalam bentuk penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, tergantung pada kondisi, karakteristik, dan kemungkinan daerah yang bersangkutan Pengelolaan untuk kepentingan umum. (3) Laba dan/atau menghasilkan laba. Berisi penjelasan tentang tahapan penelitian yang menggambarkan urutan logis untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan harapan dan gambaran sistem. Jika ada gambar dan tabel, itu harus disajikan dengan nama tabel dan gambar yang disertai dengan nomor urut.

2.2. Profil BUMD Yang Ada Di Kabupaten Kebumen

Badan Usaha Milik Daerah memberikan manfaat umum bagi pengembangan ekonomi lokal dan kepentingan umum dalam bentuk penyediaan barang dan jasa berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan keadaan, karakteristik, dan kemungkinan setempat. Untuk mendorong pembangunan daerah, BUMD memainkan peran penting dalam menyediakan layanan publik, menyeimbangkan kekuatan pasar, mendukung pengembangan UKM, dan berkontribusi pada pendapatan daerah.

Kabupaten Kebumen, seperti halnya dengan kabupaten lain juga memiliki badan usaha milik daerah (BUMD). Adapun BUMD yang ada di Kabupaten Kebumen antara lain adalah:

1. PT Bank Jateng
2. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)
3. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)
4. Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa
5. PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)
6. PT. BKK Jateng (Perseroda)

Dari keenam BUMD tersebut, hanya 3 (tiga) badan usaha yang kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen sepenuhnya, yaitu PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dan PT. Luk Ulo Farma (Perseroda). Masing BUMD mempunyai karakteristik pelayanan yang berbeda, selain untuk memenuhi layanan publik untuk masyarakat secara luas, BUMD ini juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Kabupaten Kebumen.

Tabel 1. Komposisi Penyertaan modal Pemkab Kebumen

No.	Nama BUMD	Komposisi Penyertaan Modal	Kualifikasi	Kondisi Keuangan
1.	PT Bank Jateng	1,21%	Sehat	Laba
2.	PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	49 %	Sehat	Laba
3.	PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	100 %	Sehat	Laba
4.	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	100 %	Sehat	Laba
5.	PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	100 %	Sehat	Laba
6	PT. BKK Jateng (Perseroda)	0,73%	Sehat	Laba

Sumber: Bagian Perekonomian, SETDA Kab. Kebumen, 2021

Adapun besarnya setoran PAD berdasarkan besar deviden yang dihasilkan masing-masing BUMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Besarnya setoran deviden BUMD Kabupaten Kebumen

No	BUMD	DEVIDEN PADA BUMD				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	1,089,420,562	779,696,827	1,125,861,846	1,390,079,812	1,362,256,022
2	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	945,104,429	1,156,814,409	1,829,063,810	1,675,346,434	1,858,068,270
3	PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	66,662,610	100,124,278	130,344,129	146,874,735	171,246,615

No	BUMD	DEVIDEN PADA BUMD				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	PT Bank Jateng	5,642,070,007	4,938,519,000	8,049,633,720	8,782,974,368	9,506,097,705
	PT Bank Jateng (AMU)	11,599,000,000				
5	PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	2,559,069,519	2,759,340,653	3,075,472,682	3,731,198,675	3,655,192,203
6	PT. BKK Jateng (Perseroda)		-			
Total		21,901,327,127	9,734,495,167	14,210,376,187	15,726,474,024	16,552,860,815

Sumber: Bagian Perekonomian, SETDA Kab. Kebumen, 2021

Semua BUMD telah memiliki regulasi terbaru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Sebagian sudah berubah bentuk dan hukum menjadi PT-Perseroda dan Perumda, sisanya sedang berproses.

3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif explanatory. Studi deskriptif explanatory adalah studi yang menjelaskan konsep atau kombinasi dari dua atau lebih konsep secara rinci (Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989). Faisal (1992), di sisi lain, berpendapat bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan berbagai pembenaran atas suatu fenomena sehingga hasilnya dapat menjelaskan terjadinya suatu fenomena atau kenyataan sosial tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk membuat laporan ini adalah deskriptif eksplorasi proses pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber. Data dan informasi objektif tentang situasi terkini (current situation), situasi di wilayah studi, data faktual sumber daya alam dan potensinya. Jenis penelitian deskriptif menggambarkan peristiwa yang berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi data dengan makna yang wajar, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip logika untuk menarik kesimpulan secara keseluruhan.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami, menjelaskan, menginterpretasikan, dan menganalisis situasi saat ini. Singkatnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang situasi saat ini dan menganalisis hubungan antar variabel yang ada (Moen & Middelthon, 2015). Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, hanya menjelaskan informasi setelah fakta sesuai dengan variabel penelitian.

Teknik studi menggunakan tiga pendekatan yaitu: studi kepustakaan, focus group discussion, dan observasi. Data-data maupun informasi yang dikumpulkan dan merupakan data awal (source data) yang menjadi dasar dalam penyusunan kajian ini. Data-data ini pada umumnya berupa gambaran potensi dan peluang usaha serta kebutuhan investasi di suatu daerah yang akan mampu memberikan gambaran mengenai kebutuhan didirikannya suatu Badan Usaha Milik daerah.

Tujuannya adalah untuk merangkum penjelasan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki dan menganalisisnya

untuk mencapai kesimpulan dan rekomendasi yang kredibel dan andal. Tahapan tersebut meliputi persiapan desain penelitian, persiapan peralatan, pengambilan sampel, pengumpulan data lapangan, pembuatan tabel data, pemilihan dan pemilahan data, analisis data, implementasi data, dan penyusunan rekomendasi.

Data yang digunakan adalah data primer. Dengan kata lain adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa menggunakan perantara atau lembaga lain sebagai pihak ketiga. Data primer ini diperoleh dengan membagikan alat survey kepada responden. Jenis data primer yang diselidiki dalam survei ini adalah: seluruh data tentang peluang pendirian BUMD Aneka Usaha Kabupaten Kebumen. Penyebaran kuesioner ditujukan guna memperoleh data bagaimana persepsi masyarakat atas kebutuhan dari pendirian BUMD di Kabupaten Kebumen ini. Karena tidak diketahui besaran jumlah pengguna atau mitra layanan BUMD yang akan didirikan, Selanjutnya nonprobability sampling menggunakan teknik random untuk mendapatkan sampel yang representatif (mewakili populasi). Menurut Prasetyo dan Jannah (2006), pendekatan random digunakan karena populasi yang disurvei relatif sama (homogen) dan sulit untuk menyusun kerangka sampling. Sampel sebanyak 153 orang diperoleh untuk penelitian ini. Data karakteristik responden menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki atau 81 atau 52,9%, dan 72 untuk perempuan. Berdasarkan latar belakang pendidikan, responden terbesar adalah yang berlatar pendidikan sarjana (S1/D3/D4) sebanyak 73 orang atau 47,7% sedangkan untuk responden yang berlatarbelakang pendidikan Pasca sarjana (S2) sebanyak 39 orang atau 25,5% demikian pula dengan yang lulusan SMA berjumlah 39 orang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Survei Persepsi Masyarakat terhadap BUMD yang sudah ada di Kabupaten Kebumen

Pelayanan merupakan salah satu indikator dalam operasional usaha perusahaan. Pelayanan yang baik akan mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk atau jasa yang dikelola oleh perusahaan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi usaha tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kabupaten Kebumen mengenal dengan baik terhadap produk maupun jasa yang diberikan oleh BUMD yang ada di Kabupaten Kebumen, seperti Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa, PT BPR BKK Kebumen (Perseroda), PT. Luk Ulo Farma (Perseroda), dan PT. BPR Bank Kebumen (Perseroda), berikut hasil kuesioner yang berkaitan dengan pelayanan BUMD yang sudah ada dan beroperasi.

Masyarakat yang mengetahui atau menggunakan jasa/layanan yang disediakan BUMD Kab. Kebumen selama ini, sebanyak 153 responden menyatakan mengetahui keberadaan BUMD tersebut dan dari 153 responden dan menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh BUMD yang dimiliki Kab. Kebumen. Adapun alasan responden menggunakan jasa/layanan yang disediakan oleh perusahaan/BUMD yang dimiliki Pemerintah Kab. Kebumen, sebanyak 58 responden atau 37,9% menyatakan lokasi pelayanan yang mudah diakses, untuk pelayanan BUMD yang cepat, ramah, dan prima dipilih oleh 29 responden. Sebanyak 13,7% atau 21 orang memilih adanya ketersediaan informasi yang mudah dijangkau dan produk/jasa yang ditawarkan

berkualitas menjadi alasan bagi 16 responden dan sisanya menyatakan alasan lain-lain.

Berdasarkan hasil survei, tanggapan masyarakat terhadap BUMD yang sudah ada di Kabupaten Kebumen cukup beragam. Dari masyarakat yang sudah pernah menggunakan pelayanan BUMD yaitu berkisar 85,6% dan sebanyak 37,9% menggunakan karena faktor aksesibilitas, untuk produk dan pelayanan belum menjadi rujukan utama, walaupun untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD Kab, Kebumen masuk dalam kategori cukup memuaskan (69,9%), hal ini dikarenakan pelayanan yang berhubungan dengan kenyamanan, fasilitas, dan teknologi dan lain-lain masih dianggap kurang memadai (36,6%) selain itu 32,7% responden menyatakan lini usaha yang dijalankan belum mencakup seluruh kebutuhan masyarakat. Walaupun belum memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kebumen, kontribusi BUMD yang ada sekarang ini sudah cukup signifikan (73,2%).

4.2 Kajian Survei Kebutuhan Masyarakat atas Pendirian BUMD Baru di Kabupaten Kebumen

Berdasarkan hasil survei untuk harapan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kebumen dalam pendirian BUMD baru, untuk jenis pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat yang sudah tersedia namun belum memadai di Kab. Kebumen, mayoritas memilih layanan pengelolaan aset daerah yang belum memadai (23,5%) selanjutnya industri pengolahan sebanyak 22,6%. Sedangkan untuk pengelolaan Pasar Rakyat dan fasilitas rekreasi/pariwisata dipilih sebanyak 13,7% responden dan perdagangan dan/atau jasa dirujuk 9,2% responden.

Jenis pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat "yang belum tersedia", menurut responden, BUMD yang mengelola industri pengolahan (22,2%) dan Perdagangan dan/atau Jasa (20,9%) belum tersedia di Kabupaten Kebumen, selain itu Konstruksi/Perumahan Rakyat/Rusunawa (17,0%), Pergudangan 13,1%, sedangkan pangan (8,5%) diurutkan berikutnya. Untuk fasilitas rekreasi/pariwisata, pengelolaan aset daerah dan pasar, berturut-turut dipilih 7,8%, 6,5% dan 3,3% responden

Menurut responden apa yang menjadi kebutuhan daerah Kab. Kebumen sehingga Pemerintah Kab. Kebumen dipandang perlu mendirikan perusahaan/BUMD baru adalah karena perlunya optimalisasi sektor-sektor unggulan atau potensial di daerah (27,5%) dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (24,2%), Pendirian BUMD baru diharapkan dapat meningkatkan akselerasi di sektor perindustrian, perdagangan serta jasa (15,7%) juga pemerataan fasilitas pelayanan umum serta perdagangan dan jasa (15,0%), hal ini dimaksud agar pendayagunaan aset daerah agar lebih optimal (14,4%).

Bila untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kab. Kebumen mendirikan perusahaan/BUMD baru sebagai sarana peningkatan perekonomian, pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), mayoritas responden setuju (92,8%) dengan pemerintah Kab. Kebumen. Jenis usaha apa saja yang nantinya perlu dijalankan, responden menyarankan Industri Pengolahan (19,0%), Pengelolaan Aset Daerah (17,6%), Perdagangan dan/atau Jasa (16,3%), serta Fasilitas Rekreasi/Pariwisata dan Pangan yang diranking oleh 13,7% responden.

Bentuk kontribusi yang diberikan masyarakat dalam mengembangkan perusahaan/BUMD tersebut, mayoritas (30,7%) responden memilih untuk menjadi pengguna jasa/layanan BUMD tersebut. 27,5% responden menjadikan BUMD baru sebagai sarana bagi

masyarakat untuk menjadi mitra usaha (business partner) sesuai dengan lini bisnis yang dijalankan, sedangkan 24,2% responden akan mempromosikan perusahaan/BUMD tersebut kepada masyarakat sekitar. Sesuai dengan tujuan pendirian usaha yaitu membuka lapangan kerja dan itu pula yang diharapkan oleh 13,7% responden yang ingin menjadi pegawai/karyawan di perusahaan/BUMD tersebut.

Tujuan utama pendirian BUMD baru ini adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka hal ini sejalan dengan harapan masyarakat yang berkeyakinan (sangat yakin sebanyak 30,7% responden dan cukup yakin sebanyak 62,1% responden) bahwa mendirikan BUMD baru, PAD Kab. Kebumen dapat meningkat dan berkontribusi terhadap pembangunan Kab. Kebumen.

4.3 Kebutuhan Masyarakat atas Pendirian BUMD Kabupaten Kebumen

Kebutuhan masyarakat pada Kabupaten Kebumen dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 1.388.490 jiwa, memiliki kebutuhan yang beragam. Kebutuhan tersebut juga sangat bergantung kepada kondisi perekonomian di Kabupaten Kebumen. Hasil bumi pada Kabupaten Kebumen yang besar membutuhkan lokasi segmentasi yang tepat. Pada kebutuhan akan pasar yang ada di Kabupaten Kebumen membutuhkan pasar di dalam kehidupan sehari-hari untuk pemenuhan terhadap kebutuhan. Pasar yang dimaksudkan tidak hanya pasar tradisional yang diperlukan, namun juga pasar dengan segmentasi tertentu yang menekankan pada kebutuhan pelanggan, misalnya pasar khusus sembako, pasar khusus kebutuhan ATK dan lain sebagainya. Pasar dalam bentuk warung kelontong juga dapat dijadikan salah satu pendukung perekonomian masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Serta memunculkan pasar modern untuk melayani masyarakat menengah keatas dengan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik. Pengelolaan pasar membutuhkan perhatian khusus supaya memiliki lokasi yang tepat dan segmentasi yang jelas, sehingga dapat dikelola dengan baik.

Luasan lahan persawahan yang tergolong luas pada Kabupaten Kebumen sebagai penghasil padi juga menjadi mata pencaharian bagi petani. Salah satu bahan penting bagi industri pertanian adalah dengan adanya pupuk untuk menjadikan hasil tanaman padi lebih baik dan lebih optimal. Kebutuhan masyarakat, khususnya para petani akan produksi pupuk menjadi salah satu komoditi penting bagi industri pertanian. Kecamatan Puring dan Ambal, merupakan wilayah dengan hasil panen dan hasil produksi beras yang terbesar diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Kebumen, hal tersebut dipastikan bahwa kebutuhan akan pupuk bagi kecamatan tersebut akan menjadi besar.

Hasil perikanan dan kelautan menjadi hal penting bagi Kabupaten Kebumen karena memiliki wilayah yang berpotensi untuk optimalisasi hasil tangkapan ikan yang dijual ke wilayah Kabupaten Kebumen dan kabupaten lain yang membutuhkan. Sudah terdapat tempat penjualan ikan, dan masyarakat dapat membeli langsung di tempat penjualan ikan dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang baik. Selain untuk konsumsi masyarakat Kabupaten Kebumen, dapat pula diperjualkan kepada penduduk di Kabupaten lain yang membutuhkan. Selain hasil tangkapan ikan yang dijual dan memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kebumen, adanya inovasi untuk produksi garam di Kabupaten Kebumen juga telah berjalan dan memberikan dampak positif dengan hasil produksi garam yang memiliki kualitas baik. hasil

produksi garam dapat dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Kebumen dan juga dapat dijual ke wilayah lain di luar Kabupaten Kebumen.

Pendukung dalam pelaksanaan badan usaha milik daerah untuk aneka usaha adalah adanya tempat penyimpanan yang layak yaitu tempat pergudangan. Tempat pergudangan dapat dalam bentuk cold storage, gudang bahan mentah, gudang barang setengah jadi dan gudang barang jadi. Hasil bumi seperti beras dan garam dapat disimpan pada pergudangan untuk bahan sembako, hasil ikan dan kelautan dapat disimpan dalam cold storage, dan hasil produksi lainnya yang dapat disimpan dengan memanfaatkan adanya pergudangan di Kabupaten Kebumen.

Industri pariwisata pada Kabupaten Kebumen merupakan komoditi penting dalam peningkatan pendapatan daerah. Pariwisata dalam jumlah yang banyak dan memiliki ketertarikan wisata merupakan nilai jual untuk masyarakat dapat berwisata di Kabupaten Kebumen. Penerapan pariwisata menjadi andalan untuk menarik pengunjung, dengan menyediakan penyediaan tiket yang murah, transportasi yang memadai yang diharapkan tidak hanya menjadikan Kebumen menjadi destinasi wisata namun juga menjadi lokasi MICE (meeting, incentive, convention and exhibition).

5. KESIMPULAN

Di sisi lain, melihat dari perspektif ekonomi di era otonomi ini, adanya pendapatan dengan jumlah yang relatif besar, belum termanfaatkan sepenuhnya, terutama sebagai upaya alternatif dalam kaitannya dengan masalah pendanaan pembangunan daerah yang meningkat. Sehingga mengurangi ketergantungan akan pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat. Topik ini dapat dikatakan sangat strategis mengingat pelaksanaan otonomi daerah dimaknai sebagai kemandirian daerah yang terkait dengan pembiayaan pembangunan. Pemerintahan daerah perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengoptimalkan potensi Kabupaten/Kota. Sehingga BUMD dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik, dioptimalkan pengelolannya, menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar kredibel, dan berperan aktif baik dalam fungsi maupun tugasnya sebagai salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan. Di suatu daerah, jika memperoleh keuntungan atau mencari keuntungan, keuntungan tersebut dapat disumbangkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penilaian masyarakat terhadap BUMD yang ada di Kabupaten Kebumen walaupun untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD Kab, Kebumen masuk dalam kategori cukup memuaskan, hal ini dikarenakan pelayanan yang berhubungan dengan kenyamanan, fasilitas, dan teknologi dan lain-lain masih dianggap kurang memadai selain itu lini usaha yang dijalankan belum mencakup seluruh kebutuhan masyarakat. Walaupun belum memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kebumen, kontribusi BUMD yang ada sekarang ini sudah cukup signifikan.

Berdasarkan penilaian masyarakat terhadap pelayanan umum yang belum memadai adalah layanan pengelolaan aset daerah yang belum memadai selanjutnya pelayanan di bidang industri pengolahan. Demikian juga untuk pengelolaan Pasar Rakyat dan fasilitas rekreasi/pariwisata masih dianggap belum memadai dan sector perdagangan dan/atau jasa juga belum terlayani dengan baik. Untuk jenis pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat "yang belum tersedia",

menurut responden yaitu BUMD yang mengelola industri pengolahan dan Perdagangan dan/atau Jasa, untuk bidang Konstruksi/Perumahan Rakyat/ Rusunawa serta Pergudangan juga belum tersedia di Kabupaten Kebumen

Menurut responden apa yang menjadi kebutuhan daerah Kab. Kebumen sehingga Pemerintah Kab. Kebumen dipandang perlu mendirikan perusahaan/BUMD baru adalah karena perlunya optimalisasi sektor-sektor unggulan atau potensial di daerah selain itu perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pendirian BUMD baru ini diharapkan dapat meningkatkan akselerasi di sektor perindustrian, perdagangan serta jasa. Dengan adanya BUMD Aneka Usaha diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi sektor-sektor unggulan atau potensial di daerah yang akhirnya terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masyarakat Kabupaten Kebumen mengharapkan dengan adanya BUMD baru diharapkan dapat meningkatkan akselerasi di sektor perindustrian, perdagangan serta jasa juga pemerataan fasilitas pelayanan umum serta perdagangan dan jasa, hal ini dimaksud agar pendayagunaan aset daerah agar lebih optimal.

Untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kab. Kebumen berencana mendirikan perusahaan/BUMD baru sebagai sarana peningkatan perekonomian, pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan rencana tersebut mayoritas responden pun setuju dengan pendirian BUMD baru ini. Jenis usaha apa saja yang nantinya perlu dijalankan, responden menyarankan bidang usaha Industri Pengolahan, Pengelolaan Aset Daerah, Perdagangan dan/atau Jasa, serta Fasilitas Rekreasi/Pariwisata dan Pangan.

Bentuk kontribusi yang diberikan masyarakat dalam mengembangkan perusahaan/BUMD tersebut adalah dengan menjadi pengguna jasa/layanan BUMD tersebut. Bahkan masyarakat juga menginginkan BUMD baru ini sebagai sarana bagi masyarakat untuk menjadi mitra usaha (business partner) sesuai dengan lini bisnis yang dijalankan. Partisipasi masyarakat untuk mengembangkan BUMD ini juga dengan mempromosikan perusahaan/BUMD tersebut kepada masyarakat sekitar. Sesuai dengan tujuan pendirian BUMD adalah untuk membuka lapangan kerja dan itu pula yang diharapkan sebagian yang ingin menjadi pegawai/karyawan di perusahaan/BUMD tersebut. Tujuan utama pendirian BUMD baru ini adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka hal ini sejalan dengan harapan masyarakat yang berkeyakinan BUMD baru ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen.

REFERENSI

- Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi keempat, Salemba empat, Jakarta.
- Anggi Rahajeng, 2016, Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 76
- Anggara Sahya, 2014, Kebijakan Publik, Penerbit Pustaka Setia Bandung
- Atmadja, A.P.S. (1986). Mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara: suatu tinjauan yuridis. Jakarta: Gramedia.

- Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Basuki, 2008, Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta, hlm. 9-10
- Devas, Nick, Etc, 1989, dalam Masri Maris, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UII-Press, Yogyakarta, hlm. 280
- Feranika, A. dan Haryati, D. 2020. Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19. *Business Inovation & Entrepreneurship Journal*. Vol.2 No.3: p.146-152.
- Kementerian Keuangan, 2018, Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, hlm. 16
- Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta, hlm. 3
- Middelthon, Kåre Moen and Anne-Lise. 2015. "Qualitative Research Methods." In. Research in Medical and Biological Sciences, 321-378. Oslo.*
- M. Arsyad, Anwar, et.al.(eds), 1992. Prospek Ekonomi Indonesia dan Sumber Pembiayaan Pembangunan. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munthe, K. (2019). Studi Kelayakan Pembentukan Bumd Aneka Usaha Di Kabupaten Samosir. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(1), 1-13
- Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, 7(1), 17-33.
- P2 LIPI, 2010 Revitalisasi BUMD Dalam Perekonomian Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Sulistiowati. 2010. Aspek hukum dan realitas bisnis perusahaan grup di Indonesia. Jakarta, PT. Erlangga
- Surahman Surahman, Asri Lasatu, Asriyani Asriyani, 2021 "Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*
- Safri Nugraha dkk. Hukum Administrasi Negara, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.